

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pemahaman yang cermat terhadap fenomena sosial berdasarkan gejala-gejalanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data serta fakta-fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Taylor dan Bodgan dalam Bagong Suyanto (2007: 166) “Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.” Penelitian Kualitatif digunakan untuk memahami masalah sosial atau kemanusiaan dengan membangun gambaran yang kompleks, holistic, dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terinci dan diselenggarakan dalam setting yang alamiah.

Selanjutnya untuk memperoleh data, peneliti turun ke lapangan untuk melakukan wawancara terhadap aktivitas dari objek yang diteliti serta dari dokumentasi-dokumentasi yang ada sebagai pelengkap data yang dibutuhkan. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengungkap Pengawasan Badan Permusyawaratan (BAMUS) terhadap Wali Nagari di Nagari Taram Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Periode 2008-2014.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan terhadap kinerja Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan *nagari*, dimana salah satu kewenangan BAMUS adalah melakukan pengawasan. Pengawasan dalam penelitian menggunakan konsep dari Salamoen dan Nasri (2006: 76), yaitu:

1. Berjenjang

Pengawasan dilakukan secara berjenjang dimaksudkan agar dapat melakukan pengawasan berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Pengawasan dilakukan mengenai pelaksanaan peraturan *nagari* dan jalannya pemerintahan nagari pada keseluruhannya. Pengawasan dilakukan secara berjenjang yaitu dimulai dari Badan Permusyawaratan tingkat *orong* dan seterusnya dilanjutkan ke Badan Permusyawaratan tingkat *nagari*.

2. Kesadaran dan Kewajiban

BAMUS sebagai pemegang fungsi pengawasan agar dapat sadar akan kewajibannya dalam menjalankan fungsinya. Sebagai salah satu fungsi organik manajemen BAMUS berkewajiban melakukan pengawasan dengan baik untuk mengontrol peraturan *nagari*.

3. Pencegahan

Pencegahan diharapkan untuk tidak memperluas permasalahan yang ada. Pencegahan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan serta sebagai bentuk cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi pemerintahan *nagari*. Pencegahan nantinya dapat dilakukan Badan Permusyawaratan dengan menemukan solusi dari hasil evaluasi yang telah ada.

4. Pembinaan

Pembinaan ditujukan kepada Wali Nagari sebagai pemegang tampuk kekuasaan untuk bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Badan Permusyawaratan sebagai kontrol dapat melakukan pelaporan secara berkala kepada Camat atau Bupati setelah melakukan pengawasan yang nantinya dapat melakukan pembinaan secara lanjut. Pembinaan nantinya dapat dilakukan Badan Permusyawaratan dengan mengadakan pelatihan atau bimbingan khusus mengenai hal yang di indikasikan terjadi penyimpangan.

5. Obyektif

Badan Permusyawaratan dalam melakukan pengawasan harus cermat dalam menganalisis suatu permasalahan dan berpatokan pada peraturan yang berlaku. Secara obyektif ditujukan agar tidak adanya kekeliruan dalam proses pengawasan. Obyektif juga dapat diartikan agar pengawasan dapat dilakukan dengan netral dan tidak memihak siapapun.

6. Terus Menerus

Terus Menerus dalam artian bahwa Badan Permusyawaratan dapat melakukan pengawasan secara berkala atau berkesinambungan. Pengawasan seyogyanya dapat terstruktur oleh Badan Permusyawaratan sendiri.

7. Sistematis

Proses pengawasan harus secara teratur berdasarkan prosedur yang telah diatur peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan berdasarkan hak dan wewenang yang dimiliki Badan Permusyawaratan.

8. Diterministik

Diterministik dimaksudkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan adalah pengawasan pokok dalam menentukan jalannya pemerintahan *nagari*. Pengawasan Badan Permusyawaratan dikatakan pokok karena dari ketiga fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan, fungsi pengawasan menjadi penentu keberhasilan fungsi-fungsi lainnya. Pengawasan Badan Permusyawaratan berupa pengawasan antar lembaga dalam tingkat *nagari* sebelum pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

C. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di *Nagari* Taram Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Lokasi ini penulis pilih karena menurut penulis perangkat *nagari* dalam menjalankan pemerintahan

nagari masih terdapat banyak permasalahan. Hal tersebut karena lemahnya pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan. Pengawasan yang dilakukan sangat jarang dan tidak efektif dilakukan. Oleh karena itu penulis merasa lokasi ini cocok untuk melihat pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan.

D. Objek dan Alat Penelitian

Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan (BAMUS) sebagai lembaga legislatif *nagari* yang melakukan pengawasan terhadap Wali Nagari. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Alat tulis (pena, buku) untuk membantu proses pengumpulan data.
2. Kamera yang digunakan dalam proses dokumentasi.
3. Handphone yang digunakan sebagai alat perekam dalam proses pengumpulan data.
4. Komputer sebagai alat yang digunakan dalam pengolahan data.
5. Pedoman Wawancara

E. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara yang berpatokan kepada panduan wawancara. Wawancara nantinya secara

tertulis atau direkam. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Taram, Sekretaris Nagari Taram, BAMUS Nagari Taram dan Tokoh Masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tertulis yang didapatkan dari buku atau karya ilmiah, dokumen atau arsip resmi pemerintah, perundang-undangan, peraturan-peraturan daerah dan peraturan bupati, catatan organisasi serta website. Data-data tertulis tersebut yang nantinya penulis gunakan untuk menunjang data dalam mendeskripsikan mengenai pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan (BAMUS) terhadap kinerja Wali Nagari Taram.

F. Teknik Pengumpulan Data

Bagong Suyanto (2007: 186) menjelaskan ada 3 macam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi langsung, dan penelaahan terhadap dokumen tertulis.

1. Wawancara

Adapun wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari objek yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan cara bertatap muka langsung dengan objek yang diteliti. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan atau informasi langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, dan pengetahuannya. Dalam penelitian ini

wawancara dilakukan terhadap BAMUS nagari Taram, Sekretaris Nagari Taram, Wali Nagari Taram, dan Tokoh Masyarakat.

2. Observasi

Observasi peneliti lakukan untuk mendapatkan langsung data yang berupa kegiatan, perilaku, interaksi yang terjadi dilapangan sebagai pelengkap data dari wawancara. Observasi dilakukan langsung ke lokasi penelitian yaitu di *Nagari* Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.

3. Penelaahan Dokumen Tertulis

Menelaah dokumen-dokumen tertulis ditujukan untuk menunjang data-data yang diperlukan dalam penelitian berupa rujukan atau referensi dari buku, kutipan, catatan organisasi, terbitan resmi, perundang-undangan, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, dan website yang sesuai dengan tema penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap berikut:

1. Editing

Editing digunakan untuk meneliti kembali data yang diperoleh dari wawancara, observasi langsung dan penelaahan dokumen tertulis untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Editing meninjau kembali kesalahan

dalam kalimat dan merubah sekaligus menyajikan kalimat yang tidak baku menjadi kalimat baku dengan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan upaya memperoleh arti yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis. Interpretasi dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pengawasan BAMUS terhadap kinerja Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh untuk mendukung proses analisa, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa data. Dalam analisa data ini, data yang sudah terkumpul akan diolah yang kemudian akan di analisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis Pengawasan Badan Permusyawaratan (BAMUS) terhadap Wali Nagari Taram Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Periode 2008-2014 dengan menggunakan konsep pengawasan sebagai berikut:

1. Berjenjang
2. Kesadaran dan Kewajiban
3. Pencegahan
4. Pembinaan
5. Obyektif

6. Terus Menerus
7. Sistematis
8. Diterministik

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh disusun dan di interpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang sudah terkumpul dari penelitian.